
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern

Nur Syamsa Mutiara Tarwan¹, Dinie anggraeni dwi²

¹ (Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Universitas Pendidikan Indonesia).

²((Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Universitas Pendidikan Indonesia).

E-mail: [1nursyamsamutiarat23@upi.edu](mailto:nursyamsamutiarat23@upi.edu)[2dinieanggraenidewi@upi.edu](mailto:dinieanggraenidewi@upi.edu)

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila di jadikan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat, nilai budaya dan nilai agama yang terkandung dalam pandangan hidup di Indonesia. Mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan. Yang dimana agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi masyarakat. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila kedalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya.

Kata kunci : aktualisasi, nilai-nilai Pancasila, era modern

Abstract

Pancasila is the basis of the state and the way of life the Indonesian people. As the basis of the state, Pancasila is made into ideology of the Indonesian nation and state, Pancasila is the crystallization of customary values, cultural values and religious values contained in the view of life in Indonesia. Actualizing Pancasila values into the life of society, nation and state is a necessity. Which is to ensure that Pancasila remains relevant in its function of providing guidelines, for the community. the actualization of Pancasila values in practical life is always a change and renewal in transforming Pancasila values into norms and life practices by maintaining their consistency, relevance, and contextualization.

Keywords : relevance, Pancasila values, modern era

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir dari ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, dengan berkembangnya zaman Pancasila mendapat tantangan seperti, mulai melemahnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat bukan hal penting untuk memperingati hari lahirnya Pancasila tetapi mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya untuk rakyat tapi seluruh bangsa Indonesia, Pancasila itu sebenarnya adalah kita. Pancasila sebagai alas pijakan atau landasan dari berbagai perbedaan kemudian atas nama Pancasila orang-orang dilarang bicara tentang suku bangsanya karena ada dalam konstitusi. Pancasila hadir sebagai fasilitator tumbuh kembangnya agama dan kepercayaan. Tantangan era sekarang memang seperti itu karena generasi kita bukan generasi untuk melihat perang keadaan kemerdekaan dan seterusnya. Generasi sekarang memiliki karakter yang berbeda dengan adanya kecanggihan teknologi informasi yang dimiliki kita tidak merasakan kehidupan bernegara. Setiap bangsa di dunia senantiasa memiliki suatu cita-cita serta pandangan hidup yang merupakan suatu basis nilai dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Bangsa yang hidup dalam kawasan suatu Negara bukan terjadi secara kebetulan, melainkan melalui suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini menurut Ernest Renan dan Hans Khons sebagai suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pembaruan maka harus mendasar pada suatu kerangka pikir, sumber nilai serta arahan dalam tujuan pengaplikasian, peresaliasan maupun pengaktualisasian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Aktualisasi Nilai Pancasila

Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sedangkan aktualisasi Pancasila memberi penjabaran nilai-nilai nilai Pancasila dalam bentuk norma kemudian merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aktualisasi Pancasila penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum kenegaraan dan norma-norma moral kemudian aktualisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Nilai Pancasila terletak pada bangsa Indonesia itu sendiri pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- I. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri sehingga bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis nilai tersebut sebagai hasil pemikiran penilaian kritis serta hasil refleksi fisiologis bangsa Indonesia.
- II. Nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- III. Di dalam nilai Pancasila terkandung 7 nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, estetis dan nilai religius dengan Budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa menurut darmodiharjo tahun 1996

Bangsa Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa di atas dasar nilai Pancasila yang yang diistilahkan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berisi tentang asumsi-asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai dan sumber hukum sehingga Pancasila patut untuk

diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi objektif dan subjektif.

1. Aktualisasi Pancasila objektif

Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila berbagai bidang kehidupan an-nur Gaara yang meliputi kelembagaan negara antara lain meliputi legislatif eksekutif maupun yudikatif. Kemudian selain itu meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti dalam bidang politik ekonomi hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang GBHN pertahanan keamanan pendidikan dan bidang kenegaraan lainnya.

2. Polarisasi Pancasila subjektif

Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila dalam setiap individu terutama dalam aspek moral kaitannya dengan hidup negara dan bermasyarakat. Aktualisasi yang subjektif tidak terkecuali baik warga negara Indonesia biasa aparat penyelenggara negara penguasa negara terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan setiap individu untuk mengamalkan Pancasila pelaksanaan akan akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian

yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya untuk menimbulkan akibat moral dan lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

2. Aktualisasi Pancasila dalam Aspek Kehidupan di Era Modern

Untuk dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai macam era termasuk era reformasi. Pancasila dengan nilai-nilainya harus diaktualisasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai berikut :

a) Bidang Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV “..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sehingga system politik Indonesia adalah Demokrasi pancasila.

Globalisasi di era reformasi merupakan sekutu masyarakat dan bukan lawan seperti terkesan selama ini. Tetapi perlu diingat pula bahwa setiap agenda politik Indonesia di era

reformasi dalam menghadapi era globalisasi harus sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Selama ini, sedang gencar-gencarnya Negara maju dalam melakukan politik luar negerinya yang selalu mengintervensi Negara lain dengan tujuan tertentu. Misalnya, menyangkut eksploitasi sumber daya alam di Freeport, pertambangan Blok Cepu, dan tempat-tempat yang melalui agenda politiknya. Selain itu, terjadi intervensi politik berkaitan dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, terorisme, lingkungan hidup yang justru merugikan negara kuat. Oleh karena itu, sebagai pengamalan dari Pancasila Indonesia perlu memosisikan diri dalam mengambil sikap politik yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya, bukan pada kepentingan Negara lain. Dimana demokrasi pancasila itu merupakan system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-citadan tujuan negara. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai. Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu muncul ke permukaan. Berbagai macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat mereka kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati atau penjara 150 tahun bagi yang terbukti. Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era globalisasi saat ini , pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena

globalisasi adalah sebuah kepastian sejarah, maka pemerintah perlu bersikap. "Take it or Die" atau lebih dikenal dengan istilah "The Death of Government". Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi public services management.

b) Bidang Ekonomi

Seiring dengan kemajuan teknologi Informasi yang menghadirkan kemudahan dalam melakukan akses informasi, aktifitas perekonomian berkembang pesat melampaui batas Negara. Kemajuan tersebut telah mendorong globalisasi ekonomi yang membentuk pasar bebas. Regionalisme dan aliansi ekonomi berkembang pesat dengan adanya aliansi-aliansi ekonomi seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), North American Free Trade Agreement (NAFTA), dan European Union (EU). Pemberlakuan pasar bebas dan perdagangan bebas menciptakan iklim kompetisi yang ketat, mendorong setiap negara mendorong mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif. Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

Adapun Pilar Sistem Ekonomi Pancasila yang meliputi :

1. ekonomika etik dan ekonomika humanistic.
2. nasionalisme ekonomi & demokrasi ekonomi

3. ekonomi berkeadilan sosial.

Seorang pengamat Ekonomi Indonesia, Prof. Laurence A. Manullang, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun berbagai resep telah dibuat untuk menyembuhkan penyakit utang Internasional, tetapi hampir disepakati bahwa langkah pengobatan yang diterapkan pada krisis utang telah gagal. Fakta yang menyedihkan adalah Indonesia sudah mencapai tingkat ketergantungan (kecanduan) yang sangat tinggi terhadap utang luar negeri. Sampai sejauh ini belum ada resep yang manjur untuk bisa keluar dari belitan utang. Penyebabnya adalah berbagai hambatan yang melekat pada praktik yang dijalankan dalam sistem pinjaman internasional, tepatnya negara-negara donor. Keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk segera memasuki industrialisasi dengan meninggalkan agraris, telah menciptakan masalah baru bagi national economic development. Bahkan menurut sebagian pakar langkah Orde baru dinilai sebagai langkah spekulatif seperti mengundi nasib, pasalnya, masyarakat Indonesia yang sejak dahulu berbasis agraris. Sebagai konsekuensinya, hasil yang didapat, setelah 30 tahun dicekoki ideologi 'ekonomisme' itu justru kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin merosot tajam (dekadensia). Jika hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan, akan mendapat pukulan mahadasyat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini muncul, karena pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat lemah masih parsial dan cenderung dualisme, antara kemandirian (ketergantungan) pemerintah kepada IMF, sementara keterbatasan akomodasi bentuk perekonomian masyarakat yang tersebar (diversity of economy style) di seluruh pelosok negeri tidak tersentuh. Hal ini juga terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak proporsional, tidak mencerminkan model perekonomian yang telah dibangun oleh para Founding Father terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus, misalnya, pencabutan subsidi di tengah masyarakat yang sedang sulit mencari sesuap nasi, mengelabui masyarakat dengan raskin (beras untuk rakyat miskin), atau

jaring pengaman sosial (JPS) lain yang selalu salah alamat. Apalagi dengan dibukanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang dilain pihak menguntungkan pihak-pihak yang bermodal besar, akan tetapi di sisi lain sangat merugikan pihak-pihak kecil yang tidak mampu bersaing dengan Negara luar.

c) Bidang Sosial Budaya

Perkembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dari setiap dampak yang ditimbulkan, dalam bidang sosial budaya tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, bahkan menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini diptahankan. Sikap yang harus ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengamalan dari Pancasila dalam menghadapi nilai-nilai globalisasi, terutama dalam kehidupan sosial budaya. Perubahan sosial berikutnya bahwa pluralitas tidak terfokus hanya pada aspek SARA, tetapi dimasa yang akan datang kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ditandai dengan adanya sinergi dari peran, fungsi dan profesionalisme individu atau kelompok. Sehingga kontribusi profesi individu/kelompok itulah yang akan mendapat tempat dimanapun mereka berprestasi. Ini menunjukkan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa dan kehendak manusia.

d) Bidang Hukum

Pancasila bukan mendadak terlahir pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi melalui proses panjang sejalan dengan panjangnya perjalanan sejarah bangsa

Indonesia. Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sejarah telah mencatat, kendati bangsa Indonesia pernah memiliki tiga kali pergantian UUD, tetapi rumusan Pancasila tetap berlaku didalamnya. Kini, yang terpenting adalah bagaimana rakyat, terutama kalangan elite nasional, melaksanakan Pancasila dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi menjadikan Pancasila sekadar rangkaian kata-kata indah tanpa makna. Jika begitu, maka Pancasila tak lebih dari rumusan beku yang tercantum dalam Pembukaan UUD '45. Pancasila akan kehilangan makna bila para elite tidak mau bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bila Pancasila tidak tersentuh dengan kehidupan nyata, Pancasila tidak akan bergema. Maka, lambat-laun pengertian dan kesetiaan rakyat terhadap Pancasila akan kabur dan secara perlahan-lahan menghilang. Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi terutama dalam era reformasi sekarang ini yang harus diperhatikan, pertama, pemantapan jati diri bangsa. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain:

1. Perdamaian—bukan perang.
2. Demokrasi—bukan penindasan.
3. Dialog—bukan konfrontasi.
4. Kerjasama—bukan eksploitasi.
5. Keadilan—bukan standar ganda.

Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah

keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Di era reformasi seperti sekarang ini, begitu banyak tantangan yang telah, sedang dan yang akan dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa sehingga pengaplikasian melalui nilai-nilai Pancasila dengan mengikutsertakan kesadaran warga negara perlu ada dan harus ditanamkan disetiap jiwa-jiwa generasi penerus bangsa, karena kesadaranlah input yang paling kecil namun hal yang paling utama dalam melakukan suatu perbaikan dengan output yang sangat besar.

3. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Nilai dalam bahasa Latin berasal dari kata *Valere* yang berarti kuat, baik dan berharga. Nilai adalah sesuatu yang berguna, berharga, dan baik bagi kehidupan manusia. Terdapat tatanan nilai dalam kehidupan bernegara yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar adalah azas-azas bersifat mutlak yang tidak bisa berubah, hal ini meliputi nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai Instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar (Pancasila) yang terwujud dalam norma sosial dan norma hukum. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis ini akan membuktikan apakah nilai dasar dan instrumental benar-benar hidup dimasyarakat atau tidak. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak dahulu kala yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia sampai kapanpun. Dimana baik nilai dasar ataupun nilai instrumen semuanya bersifat abstrak maka perlu dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila,

Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan)

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan YME sesuai dengan

agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Menghargai setiap bentuk ajaran agama dan kepercayaan orang lain.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
5. Berhenti saling menyakit, mulailah saling menghargai.
6. Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan.
7. Berhenti takabur, mulailah bersyukur.

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
(Nilai Kemanusiaan)

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling menyintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan diartikan suka sekali melakukan kegiatan kemanusiaan sehingga setiap setiap manusia dapat hidup layak, bebas, dan aman.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh

umat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain.

9. Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah.
10. Berhenti memaki, mulailah memakai hati.
11. Berhenti curiga, mulailah menyapa .

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
6. Berhenti berseteru, mulailah bersatu.
7. Berhenti memaksakan, mulailah berkorban.
7. Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
5. Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat.
6. Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada.
7. Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyarah.

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Bersikap adil.
3. Menghormati hak-hak orang lain.
4. Tidak bersikap boros.
5. Tidak bergaya hidup mewah.
6. Tidak merugikan kepentingan umum.
7. Suka berkerja keras.
8. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.
9. Berhenti malas, mulailah bekerja keras.
10. Stop diskriminasi, mulailah toleransi.
11. Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi.

KESIMPULAN

1. https://www.academia.edu/download/56942917/134-File_Utama_Naskah-387-1-10-20130923.pdf (di unduh pada 03 nopember 2022 pukul 08.43)
2. RI. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas

Berdasarkan berbagai fenomena tentang aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila di era reformasi saat ini, kita seharusnya jangan membiarkan negara kita terus terpuruk. Kita harus mengaktualisasikan nilai – nilai Pancasila dalam setiap kehidupan kita masing – masing. Kita jangan hanya menjadi penonton ulung, yang hanya mampu mengkritik, janganlah kita menjadi pembaca – pembaca yang baik, tapi kita harus mewujudkannya good governance dalam setiap kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila itu ada dua pelaksanaannya sebagai ideologi yakni pelaksanaan objektif dan pelaksanaan subjektif pelaksanaan objektif itu bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum bukan dari kepentingan golongan tertentu dan seterusnya dia harus atas nama kemerdekaan rakyat dan tercermin dalam setiap aturan kita bisa lihat sendiri ada banyak aturan atau undang-undang yang digugurkan oleh mahkamah konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi yang artinya tidak konstitusi berarti tidak Pancasila karena undang-undang itu norma Pancasila adalah nilainya. Secara tidak langsung menemui ini memberi dampak baik bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan saat pandemi tersebut seperti nilai gotong-royong saling membantu nilai persatuan itu semua termasuk dalam nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

3. Supardan, D. 2013. Tantangan Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi. Dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah. Jurnal Ilmu-il-mu Budaya Dan Sosial LENTERA, 2 (4), 37-72. ISSN: 2085-6334.
4. <https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=152193#:~:text=Aktualisasi%20Pancasila%20adalah%20mengaplikasikan%20atau,dalam%20>

- [20kehidupan%20berbangsa%20dan%20bernegara](#). (di unduh pada 03 nopember 2022 pukul 00.23)
5. <https://identitasunhas.com/aktualisasi-nilai-pancasila-di-era-modern/> di unduh pada 02 nopember 2022 pukul 12.45)
 6. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/viewFile/1452/pdf> di unduh pada 04 nopember 2022 pukul 11.06)
 7. Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593> , diakses pada 03 nopember 2022 pukul 11.12)
 8. Winarno, dan Raharjo, 2018, 'Realisasi Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ideologi Bangsa', Prosiding Seminar Nasional Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, hh. 219-238.
 9. Widiseuseno, I., 2014, 'Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara', *HUMANIKA*, Vol. 20, No.2, hh. 62-66.
 10. https://www.academia.edu/download/ad/56942917/134-File_Utama_Naskah-387-1-10-20130923.pdf (di unduh pada 03 nopember 2022 pukul 08.43)
 11. RI. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
 12. Supardan, D. 2013. Tantangan Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi. Dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah. Jurnal Ilmu-il-mu Budaya Dan Sosial* LENTERA, 2 (4), 37-72. ISSN: 2085-6334.
 13. <https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=152193#:~:text=Aktualisasi%20Pancasila%20adalah%20mengaplikasikan%20atau,dalam%20kehidupan%20berbangsa%20dan%20bernegara>. (di unduh pada 03 nopember 2022 pukul 00.23)
 14. <https://identitasunhas.com/aktualisasi-nilai-pancasila-di-era-modern/> di unduh pada 02 nopember 2022 pukul 12.45)
 15. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/viewFile/1452/pdf> di unduh pada 04 nopember 2022 pukul 11.06)
 16. Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593> , diakses pada 03 nopember 2022 pukul 11.12)
 17. Winarno, dan Raharjo, 2018, 'Realisasi Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ideologi Bangsa', Prosiding Seminar Nasional Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, hh. 219-238.
 18. Widiseuseno, I., 2014, 'Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara', *HUMANIKA*, Vol. 20, No.2, hh. 62-66.
 - 19.